

NASIONALISME EKSPANSIONIS REZIM DONALD TRUMP MELALUI DOKTRIN POLITIK AMERICA FIRST DAN MAGA

Didin Sabarudin

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, didinsabarudin@ukri.ac.id

Abstract: *The unilateral tariff policy of the United States (US) under President Donald Trump has significantly changed the global trade landscape in recent years. The spirit of protectionism, with its America First political promise and Make America Great Again! (MAGA) political program, marks this policy, which has created inequality in trade relations between developed and developing countries. The most obvious impact on Indonesia is the difference in tariff treatment between US and Indonesian products, where Indonesian exports will be subject to a 19 percent tariff covering 8 key terms of the agreement. Trump's MAGA doctrine demonstrates chauvinist nationalism adopted as an instrument of protectionism to maintain US hegemony in its trade policy, where the economic aspect of foreign policy is an essential instrument through economic means to achieve geopolitical interests and exploit geopolitical developments to ensure domestic economic prosperity. Therefore, US liberal democracy has been destroyed by the presence of Trump and his supporting large capitalist cronies who have turned the state into an instrument of capitalist interests. The tariff policy actually emphasizes the shift in power to an oligarchic state serving a handful of economic elites and demonstrates the ruling class in the US by shifting competitive capital to monopoly capital. The enactment of the One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) as a political instrument strengthened the alliance between oligarchic capitalism, militarism, and right-wing nationalism in the US domestic landscape. The fiscal package included tax cuts for the upper class and upward wealth redistribution, which cut subsidies for the poor, the disabled, and social security. This zero-sum logic, a product of US expansionist capitalism, uses tariffs and trade policies as tools to subjugate developing countries.*

Keywords: *capitalism, expansionist, nationalism, protectionism, trump*

Abstrak: Kebijakan tarif unilateral Amerika Serikat (AS) di bawah kekuasaan Presiden Donald Trump berubah signifikan dalam lansekap perdagangan global beberapa tahun terakhir. Semangat proteksionisme dengan janji politik *America First* dan program politik *Make America Great Again!* (MAGA) menandai kebijakan tersebut yang memunculkan ketimpangan dalam hubungan dagang antara negara maju dan berkembang. Dampak paling nyata bagi Indonesia adalah perbedaan perlakuan tarif antara produk asal AS dan Indonesia, dimana produk ekspor Indonesia akan dikenakan tarif 19 persen meliputi 8 terma kunci dari kesepakatan perjanjian. Doktrin MAGA dari Trump menunjukkan nasionalisme chauvinis diadopsi sebagai instrumen proteksionisme mempertahankan hegemoni AS dalam kebijakan perdagangannya, dimana aspek ekonomi dalam kebijakan luar negeri merupakan instrumen esensial melalui cara ekonomi untuk mencapai kepentingan geo-politik dan memanfaatkan perkembangan geo-politik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi domestik. Karenanya, demokrasi liberal AS hancur oleh kehadiran Trump dan kroni kapitalis besar pendukungnya yang menjadikan negara sebagai instrumen kepentingan pemilik modal. Kebijakan tarif justru mempertegas pergeseran kekuasaan ke negara oligarkis yang melayani segelintir elite ekonomi dan menunjukkan kelas penguasa di AS dengan mengalihkan kapital kompetitif menjadi kapital monopoli. Diberlakukannya *One*

Big Beautiful Bill Act (OBBA) sebagai instrumen politik memperkuat aliansi antara kapitalisme oligarkis, militerisme, dan nasionalisme sayap kanan dalam lansekap domestik AS. Paket fiskalnya berupa pemotongan pajak bagi kelas atas dan redistribusi kekayaan ke atas yang memangkas subsidi bagi warga miskin, penyandang disabilitas, dan jaminan sosial. Logika zero-sum merupakan produk kapitalisme ekspansionis AS menjadikan tarif dan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk menundukkan negara-negara berkembang.

Kata Kunci: kapitalisme, ekspansionis, nasionalisme, proteksionisme, trump

PENDAHULUAN

Tarif sebagai instrumen politik Amerika telah digunakan sejak kemerdekaannya dari Inggris pada abad ke-18. Kenaikan tarif yang didukung oleh Partai Republik, partainya Trump menandai kembalinya Amerika pada tradisi proteksionisme nasional yang kerap diadopsi ketika menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Dalam sejarahnya, Partai Republik secara konsisten mendukung tarif proteksionis, mulai dari era Perang Saudara hingga abad ke-20. Puncak dari pendekatan ini terjadi pada tahun 1930, ketika Kongres mengesahkan *Smoot-Hawley Tariff Act* yang menaikkan tarif impor hingga 20% tepat saat krisis ekonomi global, *Great Depression* mulai melanda.

Penerapan tarif menyebabkan penurunan volume impor Amerika Serikat hingga 40% dalam dua tahun pertama implementasinya. Kebijakan ini turut memperparah *Great Depression*, ketika ekonomi AS runtuh dan pengangguran massal meluas akibat serangkaian krisis finansial. Kenaikan tarif yang tajam menyebabkan ekspor makanan dan produk setengah jadi merosot drastis, memperdalam kontraksi ekonomi. Kebijakan tersebut memperburuk krisis dengan memicu aksi balasan dari mitra dagang dan mempercepat penurunan perdagangan global.

Presiden F. D. Roosevelt memperkenalkan *Reciprocal Trade Agreements Act* sebagai bagian kebijakan New Deal pada 1934 menandai perubahan besar dalam arah kebijakan perdagangan AS yang memungkinkan pemerintah menegosiasikan ulang tarif dengan negara-negara mitra dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan dagang. Pada 1939, AS telah meratifikasi sejumlah perjanjian dagang bilateral guna membangun sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka.

Akibatnya, tarif rata-rata AS turun tajam dari 46% pada 1934 menjadi 12% pada 1962. Salah satu tujuannya adalah mengalihkan sumber pendapatan negara dari tarif menuju pajak pendapatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk membiayai program-program kesejahteraan. Namun, proteksionisme tarif tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan industri domestik AS pada masa itu. Tarif tinggi pada abad ke-19 berkontribusi besar terhadap pendapatan negara dan menciptakan surplus fiskal yang menopang proses industrialisasi awal Amerika (Fharose, 2025).

Kebijakan Trump 2 April 2025 merupakan pengukuhan terhadap estimasi laporan perdagangan nasional AS tentang hambatan perdagangan luar negeri AS dengan 59 negara di dunia, termasuk Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan satu bulan sebelumnya (Greer, 2025:212-225). Foster (2025) menyebut pemerintahan Trump sebagai bentuk oligarki terbuka dari kelas berkuasa, dimana kekuasaan negara federal tidak lagi berpretensi mewakili kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi liberal Amerika idealnya menegaskan pemisahan antara negara dengan pasar dan membatasi campur tangan langsung kelas pemilik modal dalam politik, namun dihancurkan secara efektif oleh kehadiran Trump dan para kroninya dari lingkaran kapitalis besar.

Dalam kondisi ini, negara bukan lagi alat regulatif atau penyeimbang, melainkan instrumen langsung dari kepentingan pemodal. Alih-alih memperkuat ekonomi nasional secara menyeluruh, kebijakan tarif justru mempertegas pergeseran kekuasaan dari negara demokratis ke negara oligarkis melayani segelintir elite ekonomi. Hal tersebut menunjukkan kelas kapitalis merupakan kelas penguasa di AS. Perbedaan periode Trump adalah

keterbukaan dan keberanian kelas kapitalis untuk mengambil peran langsung dalam pemerintahan. Sebelumnya, dominasi berlangsung melalui jalur institusional dan pengaruh tidak langsung, namun keterlibatannya kini bersifat eksplisit dan tanpa tabir. Dalam sejarahnya, kapitalis finansial merupakan fraksi paling dominan dalam kelas penguasa AS ditandai oleh kemampuannya mengendalikan ekonomi melalui mobilisasi modal maya (*fictitious capital*), dimana aset-aset keuangan yang nilainya terlepas dari produksi riil tetapi menjadi fondasi sistem keuangan modern. Oligarki finansial AS sejatinya merupakan kelas penguasa yang tidak selalu memerintah secara langsung, tetapi juga tidak pernah benar-benar terpisah dari struktur negara.

Demokrasi AS bukanlah dalam arti substantif, melainkan negara yang dikendalikan oligarki ekonomi seperti ditulis oleh Baran dan Sweezy (1966): “*Jika suara adalah sumber nominal kekuasaan politik, maka uang adalah sumber kekuasaan sebenarnya, sistem ini tampak seperti demokrasi, tetapi dijalankan dengan logika plutokrasi.*” Pengertian ini menunjukkan kelas kapitalis finansial senantiasa bereaksi terhadap kebijakan negara dengan menyalurkan kekuatan melalui kendali atas arus investasi dan membatasi atau mempercepat perputaran modal sesuai kepentingannya melalui peralihan kapital kompetitif ke kapital monopoli. Sejak Presiden Ronald Reagan pada akhir 1970-an mulai era neoliberal, perusahaan dan wiraswasta diberi kebijakan deregulasi besar-besaran dan keleluasaan untuk memperluas operasinya tanpa kendala negara, dimana para kapitalis mengalihkan pengerahan modal ke sektor finansial terutama real estat, asuransi, dan perkreditan. Dengan dukungan deregulasi keuangan, penurunan suku bunga, dan pemotongan pajak atas kekayaan dan korporasi, para kapitalis meraih keuntungan dengan membebaskan biaya hidup kepada warga melalui sistem utang, terutama dalam sektor perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam lanskap ini, Donald Trump muncul sebagai figur khas dari kapitalis finansial Amerika sebagai representasi dari fraksi kapitalis properti berbasis New York.

Ia adalah produk dari neoliberalisme itu sendiri, yaitu rezim kebijakan yang memungkinkan kelas seperti dirinya mengakumulasi kekayaan melalui spekulasi, utang, dan eksploitasi pasar properti yang deregulatif. Ketika menjabat Presiden, ia membawa serta kepentingan kelas tersebut ke dalam jantung kekuasaan negara. Sementara itu, banyak perusahaan AS memindahkan basis produksinya keluar AS demi menekan biaya tenaga kerja dan meningkatkan margin keuntungan, yang mempercepat proses deindustrialisasi di dalam negeri. Di saat yang sama, muncul generasi baru kapitalis teknologi yang menciptakan ilusi kebangkitan kapitalisme Amerika berbasis inovasi dan teknologi tinggi. Namun, hasil dari semua ini adalah konsentrasi kekayaan di tangan kapitalis finansial bersamaan dengan bangkitnya kapitalis teknologi sebagai aktor dominan baru.

Para investor dan kapitalis AS menjadikan pemerintahan Presiden Trump sebagai komite politik untuk menjalankan agenda ekonominya yang tercermin dari basis pendukung utama Trump dalam Pilpres 2024 didominasi investor dari perusahaan-perusahaan *non-go public* dan *private equity*, seperti Tim Mellon, pewaris dinasti perbankan Mellon; Ike Perlmutter, mantan eksekutif Marvel; Peter Thiel, investor di PayPal dan Palantir; Marc Andreessen dan Ben Horowitz dari Silicon Valley; serta Elon Musk, pemilik X, Tesla, dan SpaceX. Mereka mewakili tiga poros utama kapitalisme Amerika saat ini: kapital finansial, industri minyak besar, dan sektor teknologi. Foster (2025) menyebut Trump bukanlah arsitek, melainkan agen dari transformasi politik-ekonomi yang sedang berlangsung sebagai figur populis pembawa agenda kelas berkuasa ke dalam format nasionalis dan anti-globalis.

Pemerintahan Trump pada dasarnya adalah rezim miliarder dengan total kekayaan kolektif anggota kabinet Trump mencapai 460 miliar dolar AS yang mewakili hanya 0,0001% dari populasi Amerika, namun memiliki kendali besar atas kebijakan nasional. Dalam konfigurasi ini, Trump bukan sekadar presiden, ia adalah sosok perpanjangan tangan kelas kapitalis Amerika yang menjalankan negara sebagai instrumen untuk mengamankan dan memperluas kepentingan ekonomi segelintir elite (Peschek, 2026).

TINJUAN PUSTAKA**Nasionalisme Ekspansionis Dalam Proteksionisme Doktrin Trump**

Nasionalisme politik merupakan fenomena sangat kompleks daripada seperangkat nilai yang bercirikan ambiguitas dan kontradiksi. Nasionalisme telah menjadi alat pembebasan, namun juga penindasan. Nasionalisme telah menjadi sumber pemerintahan mandiri dan kemerdekaan seperti terjadi pada abad 19 dan 20 di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, namun nasionalisme juga memicu penaklukan dan penjajahan. Nasionalisme menjadi progresif sekaligus regresif dengan mengupayakan terus masa depan kemerdekaan nasional dan kejayaannya sekaligus merayakan keagungan nasional di masa lalu dan memapankan identitas yang sudah ada.

Nasionalisme juga menjadi rasional sekaligus irasional yang mengandung keyakinan prinsipil seperti penentuan diri nasional, namun juga melahirkan dorongan dan emosi non-rasional seperti kebencian atau kehebatan masa lalu. Ketidakjelasan bentuk ideologi ini merupakan produk dari sejumlah faktor yang muncul dalam konteks berbagai sejarah yang berbeda-beda, dibentuk oleh warisan-warisan budaya yang sering kali berlawanan, dan digunakan untuk mengembangkan beragam motif dan aspirasi politis. Hal tersebut mencerminkan kapasitas nasionalisme untuk melebur dengan menyerap doktrin dan ide politik lainnya, sehingga menciptakan serangkaian tradisi nasionalis yang saling bersaing (Heywood, 2012).

Gambaran dominan nasionalisme di banyak negara, seperti Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan China cenderung memiliki aspek agresi dan militerisme. Pada awal abad ke-20, persaingan semakin besar diantara kekuatan-kekuatan Eropa membaginya menjadi dua kubu besar, yaitu *Triple Entente* yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Rusia dengan *Triple Alliance* terdiri atas Jerman, Austria, dan Italia. Nasionalisme agresif dan ekspansionisme meraih titik tertinggi dalam periode antarperang dunia ketika rezim-rezim otoritarian dan fasis Jepang, Italia, dan Jerman mengusung kebijakan ekspansi imperium dan dominasi dunia yang melahirkan perang dunia pada 1939.

Perbedaan bentuk nasionalismenya adalah chauvinisme sebagai istilah rujukan dari Nihcolas Chauvin, serdadu Perancis yang sangat fanatik memuja Napoleon I. Setiap bangsa tidak pernah dilihat memiliki kesetaraan dalam hak untuk menentukan nasib sendiri, sebaliknya beberapa bangsa meyakini memiliki sejumlah karakteristik atau kualitas sebagai lebih unggul daripada bangsa lain. Di Eropa abad ke-19 tampak jelas dalam imperialismenya menjustifikasi ideologi rasial dan keunggulan budaya sangat percaya bahwa orang-orang kulit putih Eropa dan Amerika secara intelektual dan moral lebih unggul daripada orang-orang Afrika dan Asia yang berkulit hitam, kulit coklat, dan kulit kuning. Bahkan, orang-orang Eropa memotret imperialisme sebagai sebuah tugas moral bahwa masyarakat kolonial merupakan beban orang kulit putih, khususnya dalam agama Kristen sebagai belas kasih terhadap yang kurang beruntung dan tertinggal di dunia (Heywood, 2012).

Chauvinisme nasional lahir dari bentuk perasaan antusiasme nasional menggebu, bahkan histerik. Individu sebagai makhluk rasional otonom disapu semuanya oleh gelombang pasang emosi patriotik yang terekspresikan dalam bentuk hasrat akan agresi, ekspansi, dan perang. Charles Maurras (1868-1952) menyebut patriotisme menggebu ini sebagai nasionalisme integral, dimana individu dan kelompok independen kehilangan identitasnya dari bangsa yang kuat dalam segalanya dengan eksistensi dan makna melampaui hidup individu tunggal manapun. Nasionalisme militan seperti ini sering kali disertai oleh militerisme, dimana kejayaan militer dan penaklukan menjadi bukti tertinggi keagungan bangsa dan mampu membangkitkan perasaan menggebu komitmen nasionalis.

Perasaan seperti ini sering distimuli oleh integrasi negatif, yaitu memotret bangsa atau ras lain sebagai ancaman atau musuh yang berkembang dari pemilahan tegas antara "kita" dan "mereka." Harus ada mereka sebagai sasaran kemarahan atau kebencian untuk menempa perasaan kita. Itulah wajah gelap nasionalisme, yaitu ikatan-ikatan irasional tribalisme yang membedakan "kita" dari "mereka" sebagai asing dan ancaman. Demikian pula, kekuatan

emosional nasionalisme di masa perang akan membujuk setiap individu untuk membunuh atau mati demi negaranya, tidak peduli alasannya benar atau tidak, dan adil atau tidak.

Pada era pemerintahan Trump, nasionalisme chauvinis digemakan kembali melalui janji politik *America First* dan gerakan politik *Make America Great Again!* sebagai respons terhadap berbagai masalah kronis yang dihadapi struktur ekonomi Amerika pasca Perang Dunia mengalami disrupsi permanen berupa deindustrialisasi sejak bergulir era globalisasi menimbulkan skeptisisme terhadap logika ekonomi pro-perdagangan bebas. Penyebabnya selain otomatisasi perkembangan teknologi diperburuk oleh munculnya kebijakan liberalisasi perdagangan sejak berakhirnya Perang Dingin yang menimbulkan fenomena kerawanan strategis dengan ancaman interdependensi ekonomi global (Farrel & Newman, 2019).

Kebijakan tersebut dirubah drastis oleh Trump sejak menjabat pada periode pertamanya sebagai presiden tahun 2016 dengan meninggalkan konsensus perdagangan bebas dan diadopsinya kembali instrumen proteksionisme dalam kebijakan perdagangan Amerika. Sejak era Obama, aspek ekonomi dalam kebijakan luar negeri (*economic statecraft*) atau geo-ekonomi yang meliputi kebijakan dagang mulai dianggap sebagai instrumen esensial dalam kebijakan luar negeri melalui dua elemen pentingnya, yaitu menggunakan cara ekonomi untuk mencapai kepentingan geo-politik dan memanfaatkan perkembangan geo-politik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di kancah domestik. Kehadiran figur Donald Trump dengan *America First* dan *Make America Great Again!* merupakan gejala kembalinya proteksionisme Amerika Serikat karena adanya imperatif dari dimensi ekonomi politik. Terjadinya *retreat* dari unipolaritas global untuk mempertahankan kepentingan Amerika oleh pemerintahan Trump, salah satu bentuknya dengan pengumuman tarif resiprokal *Liberation Day* pada 2 April 2025 melalui lingkaran elit kabinetnya, yaitu Menlu Marco Rubio.

METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini bersifat kualitatif menggunakan metode analisis yang disampaikan oleh praktisi bermazhab kritis untuk mempelajari berbagai aspek, baik dalam hal sosial maupun politik (Flowerdew & Rizhardson, 2017; Ghauri & UMBER, 2019; Mullet, 2018), dimana signifikansi historisnya dengan komponen fundamentalnya sudah tersedia dalam teori kritis mazhab Frankfurt. Analisis kritis bukanlah pemikiran tunggal, melainkan sebuah pendekatan dan alat bantu penelitian yang di dalamnya terdapat banyak kecenderungan dan aliran pemikiran bertujuan untuk mengungkap ketidaksetaraan sosial politik, relasi kekuasaan yang berakar pada konteks politik, ekonomi, budaya, dan agama (Khoirunisa & Indah, 2022; Mogashoa, 2014; Suppiah et al., 2019).

Wacana Trump bukan hanya produk masyarakat Amerika, melainkan bertanggungjawab membentuk wacana sosial secara internasional. Dimensi kekuasaan ekspansionis demikian jelas dalam wacana Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan salah satu negara terkuat di dunia. Janji politik *America First* dan program politik *Make America Great Again!* yang digemakan oleh Trump merupakan topik atau tema dalam bidang yang paling penting dalam domain sosial, yaitu politik. Wacana tersebut terutama berkaitan dan bereaksi dengan nasionalisme chauvinis yang menggunakan kekuasaan dan dominasi untuk membujuk pikiran dan opini masyarakat disebarluaskan melalui media elektronik dan menjadi viral di media sosial (Beard, 2000).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggal 22 Juli 2025, Presiden AS Donald J. Trump menandatangani perjanjian kerja sama dagang dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Perjanjian ini bertujuan mengatasi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia sebagai bagian dari proses deeskalasi perang tarif yang diluncurkan Presiden Trump pada 2 April 2025. Dalam kesepakatan tersebut, ekspor Indonesia ke AS akan dikenai tarif sebesar 19 persen dengan cakupan delapan terma kunci perjanjian, yaitu: 1) *Eliminating Tariff Barriers*; 2) *Breaking Down Non-Tariff Barriers for U.S. Industrial Exports*; 3) *Breaking Down Non-Tariff*

Barriers for U.S. Agriculture Exports; 4) Strengthening Rules of Origin; 5) Removing Barriers for Digital Trade; 6) Aligning on Economic Security; 7) Improving Labor Standards; dan 8) Notching Commercial Deals (Trump, 2025).

Selain delapan poin diatas, Indonesia juga diwajibkan mengizinkan penyimpanan data pribadi di wilayah hukum AS sesuai permintaan perusahaan-perusahaan Amerika dan mencakup pengakuan terhadap regulasi Amerika di sektor obat-obatan, otomotif, dan agrikultur. Indonesia juga sepakat untuk mencabut pembatasan ekspor atas komoditas industri dan mineral strategis yang dikirim ke AS. Sebagai bagian dari komitmen dagang, Indonesia diperkirakan akan membeli pesawat buatan AS senilai 3,2 miliar dolar, serta produk agrikultur sebesar 4,5 miliar dolar merupakan hasil negosiasi yang mencegah penerapan tarif 32 persen atas ekspor Indonesia ke pasar Amerika (William, 2025).

Kebijakan ini dirancang untuk menguntungkan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Selain Indonesia, Inggris dan Vietnam juga terlibat dalam negosiasi tarif dengan Presiden Trump, seluruhnya berujung pada hasil yang lebih menguntungkan AS. Langkah ini merupakan babak baru neo-merkantilisme yang memadukan tarif dan intervensi negara untuk mengakumulasi kekayaan nasional dan mempertahankan kekuatan ekonomi politik. Penggunaan proteksionisme oleh Trump sebagai instrumen untuk menjaga hegemoni Amerika yang semakin tergerus oleh deindustrialisasi dan globalisasi finansial.

Strategi ini bertujuan membentengi industri dalam negeri dengan membatasi impor dan menegosiasikan ulang relasi dagang demi kepentingan nasional AS. Secara teknis, kebijakan tarif Presiden Trump menyerupai semangat negosiasi *Agreements Act*, dampaknya dalam jangka panjang justru cenderung menjadi beban, seperti proyeksi Penn Wharton Budget Model (2025) rencana tarif Presiden Trump diperkirakan akan menambah pendapatan negara sekitar USD 5,2 triliun dalam sepuluh tahun ke depan sebagai dana yang direncanakan untuk membayar utang nasional. Namun, tarif tersebut juga diproyeksikan menurunkan Produk Domestik Bruto dan pendapatan per kapita masyarakat secara signifikan, dimana rumah tangga AS pada akhirnya akan berada dalam posisi yang lebih buruk, karena beban cukai atas barang impor dialihkan kepada konsumen domestik. Penurunan impor dan arus modal juga diperkirakan mendorong investor dan pemerintah asing untuk melepas aset-aset berbasis dolar yang menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam iklim ekonomi. Dalam jangka panjang, PDB AS diperkirakan akan menyusut antara 6 hingga 8 persen dengan penurunan pendapatan seumur hidup warga AS dikisaran USD 22.000-58.000.

Cozzolino (2018) berargumen bahwa Trumpisme bukanlah merupakan penyimpangan neoliberalisme, melainkan bentuk lanjutannya, yaitu evolusi logis yang tetap bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan ke atas. Di satu sisi, Trump mengusung nasionalisme ekonomi melalui penarikan AS dari berbagai perjanjian dagang dan penerapan tarif proteksionis. Namun di sisi lain, ia memperkuat agenda neoliberalisasi domestik dengan mendorong deregulasi sektor swasta dan pelemahan kapasitas negara. Kombinasi ini mencerminkan respons rasional kapitalis AS dalam menghadapi ancaman struktural dari China sebagai penantang utama hegemoni AS.

Neo-merkantilisme Trump bukanlah sekadar retorika nasionalis, melainkan strategi untuk mempertahankan posisi dominan kapitalisme AS dalam tatanan global. Kapitalisme AS beroperasi dengan logika zero-sum, yaitu kemenangan satu aktor berarti kekalahan yang lain. Maka, tarif dan kebijakan perdagangan dijadikan alat untuk menundukkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam agar tetap berada dalam orbit dominasi kapitalis AS. Hal ini terlihat jelas dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan AS bukan hanya menyasar sektor barang, tetapi juga memperluas kontrol atas infrastruktur digital dan keuangan. Permintaan agar data pribadi warga Indonesia disimpan di AS mencerminkan kepentingan kapitalis teknologi, sementara pendanaan ekspor agrikultur dan industri Amerika mencerminkan strategi kapitalis finansial menanamkan dominasi struktural melalui perdagangan.

Tatanan politik-ekonomi dalam negeri AS mengalami perombakan besar seiring dengan gelombang neo-liberalisasi yang semakin dalam. Melalui *One Big Beautiful Bill Act* (OBBBA),

Presiden Trump mendorong redistribusi kekayaan ke atas dengan memangkas subsidi bagi warga miskin, penyandang disabilitas, serta jaminan sosial demi membiayai pemotongan pajak bagi kelas atas. Menurut laporan Sam Fleming dan Myles McCormick di *Financial Times* 14 Juli 2026, OBBA akan memberikan pemotongan pajak senilai 4,5 triliun dolar AS, melanjutkan kebijakan serupa yang pertama kali dijalankan Trump pada masa jabatan pertamanya pada 2017.

Dampaknya memunculkan ketimpangan sangat tajam. OBBA akan memotong pendapatan bagi 20 persen warga AS termiskin sebesar 2,3 persen atau sekitar 560 dolar per tahun. Sebaliknya, satu persen penduduk terkaya akan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 2,1 persen atau sekitar 23.265 dolar. Selain memperlebar ketimpangan ekonomi, kebijakan ini juga akan menambah beban utang negara sebesar 3,3 triliun dolar AS pada tahun 2034. Selain itu, OBBA juga meningkatkan anggaran militer dan keamanan hingga 150 miliar dolar. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan sistem pertahanan udara "Golden Dome," pengembangan armada kapal perang, dan perluasan lembaga imigrasi ICE yang berfungsi sebagai patroli perbatasan dan penindak migran.

OBBA bukan sekadar paket fiskal dan populisme reaksioner, melainkan instrumen politik untuk memperkuat aliansi antara kapitalisme oligarkis, militerisme, dan nasionalisme sayap kanan dalam lanskap domestik Amerika Serikat. Cozzolino (2018) berargumen bahwa Trumpisme adalah sintesis antara kebijakan makro ekonomi pro-bisnis ala *supply-side economics* dan kebijakan dagang neo-merkantilis. Kombinasi ini bukan sekadar penyimpangan *ad hoc*, tetapi merupakan respons terorganisir dari kelas kapitalis Amerika terhadap krisis internal kapitalisme itu sendiri. Ketika tingkat keuntungan stagnan, baik di sektor riil maupun finansial, maka konsesi-konsesi yang sebelumnya diberikan kepada masyarakat luas, seperti subsidi, jaminan sosial, maupun investasi ke negara-negara *Global South*, mulai dicabut.

Tujuannya jelas: merebut kembali kontrol atas arah politik dan memastikan akumulasi kapital tetap berada di tangan elite. Hal tersebut merupakan ekspresi logis dari kapitalisme yang tengah merespons tekanan struktural. Ketika sistem gagal lagi menjamin pertumbuhan, maka yang diserang bukan hanya lawan eksternal seperti China atau negara berkembang, tetapi juga hak-hak sosial warga negara sendiri. Seperti dikatakan Warren Buffett secara gamblang, "*Sekarang ini ada peperangan kelas, tetapi kelas saya, kelas orang kaya, yang membuat perang, dan kita menang.*" Kalimat ini merangkum logika Trumpism dengan tajam: ini adalah bentuk perang kelas dari atas, dibungkus dengan retorika nasionalisme dan digerakkan oleh kepanikan atas menurunnya profitabilitas kapital.

Walaupun demikian, tidak berarti seluruh kapitalis Amerika bersatu padu di belakang pemerintahan Presiden Trump. Bertentangan dengan klaim John Bellamy Foster bahwa kelas kapitalis secara keseluruhan mendukung Trump, kenyataannya terdapat friksi internal yang tajam, terutama ketika Trump mengumumkan kebijakan tarif dan meluncurkan OBBA. Sejumlah fraksi dalam kelas penguasa, khususnya mereka yang lebih bergantung pada stabilitas makro ekonomi global dan pasar terbuka, melihat langkah Trump sebagai bentuk gangguan terhadap konsensus neoliberal yang selama ini menguntungkan mereka.

Edward Luce dalam *Financial Times* 2025 merangkum kritik ini secara tajam: "Anggarannya mencuri hari esok untuk membantu orang kaya hari ini." Ia menambahkan bahwa model ekonomi yang dibawa Trump pada akhirnya merugikan semua pihak: baik yang kaya maupun miskin akan kalah, dan hasil akhirnya adalah inflasi. Bagi sebagian kapitalis, terutama yang berbasis di sektor keuangan global dan ekspor teknologi, kebijakan Trump justru menciptakan ketidakpastian, menekan rantai pasok global, dan mengancam profitabilitas jangka panjang. Dengan kata lain, Trumpism bukan ekspresi keharmonisan kelas, melainkan kompromi yang rapuh dan penuh gesekan di antara berbagai fraksi dalam kapitalisme Amerika sendiri.

Tidak semua kapitalis di Amerika Serikat mendukung penuh kebijakan Presiden Trump; sebagian justru berupaya mengoreksi arah kebijakannya. Ketika Trump mengumumkan Hari Tarif Pembebasan pada 2 April 2025 sebuah deklarasi eskalasi perang dagang global, pasar keuangan merespons dengan kepanikan. Bursa saham dunia terguncang, dan terjadi

penjualan massal aset-aset AS. Dalam kurun dua hari setelah pengumuman tersebut, valuasi pasar saham Amerika anjlok lebih dari 6 triliun dolar AS. Dampaknya bersifat sistemik dan meluas: bursa saham di Eropa dan Asia ikut tertekan, menandakan ketergantungan global terhadap stabilitas ekonomi AS.

Para kapitalis kehilangan kekayaan dalam hitungan jam, sementara pekerja dan pensiunan mengalami kerugian besar dalam portofolio dana pensiun mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Trumpisme, yang diklaim mewakili kepentingan kapitalis, justru menimbulkan instabilitas yang merugikan sebagian besar kapital, terutama mereka yang bergantung pada pasar keuangan global, bukan proteksionisme nasionalis. Ketika hal tersebut terjadi, para kapitalis tidak akan tinggal diam. Kapitalis finansial akan memboikot kebijakan tersebut dengan menahan investasi. Karena negara bergantung pada pajak penghasilan dan pajak perusahaan, para kapitalis memanfaatkan ketergantungan ini dengan mengurangi investasi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya pendapatan nasional berakibat pada ketidakpercayaan mereka secara terbuka dan menjual obligasi negara untuk mendisiplinkan serta mengoreksi kebijakan pemerintah (Barrow, 1993).

Bank terbesar di AS, JP Morgan Chase melihat kasus Trump pada 2 April memprediksi akan terjadi resesi dalam enam bulan ke depan. Pernyataan ini diikuti oleh komentar dari para kapitalis seperti Ray Dalio yang menyatakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan resesi dan dampak buruk lainnya. Menurut Dalio, nilai mata uang, dalam hal ini dolar AS merupakan satu-satunya aset utama yang dipegang oleh kapitalis finansial. Ketika nilainya turun, maka kekayaan mereka ikut tergerus. Sebagai respons atas pengumuman Trump, para kapitalis menjual obligasi pemerintah AS senilai 29 triliun dolar. Aksi ini memicu kepanikan pasar dan memaksa Trump untuk mundur sementara: ia mengumumkan jeda selama 90 hari sebelum tarif atas produk-produk asing resmi diberlakukan.

Hal serupa terjadi dalam OBBBA. Elon Musk yang sempat disebut sebagai kawan pertama Trump dan merupakan orang terkaya di dunia menentang keras kebijakan tersebut. Musk menyebut langkah Trump sebagai sesuatu yang sangat gila dan destruktif. Bagi Musk, OBBBA memberi keuntungan bagi industri lama seperti minyak dengan mengorbankan masa depan industri hijau. Kapitalis teknologi seperti Musk sebagai pendukung Trump sebelumnya, bahkan sempat diberi posisi informal sebagai kepala *Department of Government Efficiency* (DOGE), akhirnya menarik dukungannya. Alasannya subsidi untuk sektor energi terbarukan yang menjadi tumpuan Green New Deal era Presiden Joe Biden dan menguntungkan kapitalis teknologi, dicabut, lalu dialihkan ke industri perminyakan. Bagi kapitalis seperti Musk, ini bukan hanya soal arah kebijakan, tapi soal siapa yang mendapat akses ke sumber akumulasi kapital negara.

Financial Times menyimpulkan bahwa OBBBA memberikan kemenangan besar bagi sektor *private equity* (kapitalis finansial) dan industri minyak. Sebaliknya, para kapitalis teknologi di Silicon Valley dan industri berkelanjutan justru mengalami kemunduran. Sektor modal privat diuntungkan karena legislator membiarkan celah dalam sistem perpajakan laba, sementara kapitalis finansial memperoleh keuntungan tambahan melalui ketentuan pajak atas laba broker yang hanya dikenai tarif atas *carried interest*, bukan sebagai penghasilan biasa. Selain itu, OBBBA juga memberikan potongan pajak untuk bunga utang, memperkuat posisi kapitalis yang bergantung pada pembiayaan berbasis *leverage*.

Tak hanya itu, OBBBA turut menguntungkan kapitalis energi fosil, terutama sektor batu bara, serta kompleks industri militer yang memperoleh tambahan alokasi anggaran. Namun, sejumlah sektor lain justru dirugikan. Penyedia layanan kesehatan dan kapitalis ritel terpukul akibat pemangkasan subsidi dan program jaminan kesehatan seperti Medicaid. Di sisi lain, kapitalis teknologi juga menderita kekalahan ganda: mereka gagal melobi pemerintah untuk menetapkan moratorium 10 tahun terhadap regulasi kecerdasan buatan (AI), dan juga kehilangan insentif serta dukungan fiskal untuk energi hijau yang sebelumnya dijanjikan di bawah kebijakan Green New Deal. Tidak semua kapitalis AS mendapatkan keuntungan setara dari OBBBA maupun kebijakan tarif. Sempat menjadi figur terdekat Presiden Trump, Elon Musk justru tersingkir dari lingkaran pengaruh karena tidak diberi ruang pengembangan sektor energi terbarukan, bidang yang menjadi inti kepentingan bisnisnya. Namun, bukan

berarti seluruh kapitalis teknologi dikesampingkan dalam alokasi anggaran pemerintah AS. Sebagian perusahaan teknologi tetap mendapat porsi strategis dari belanja negara, terutama di sektor keamanan dan militer. OpenAI menerima kontrak senilai 200 juta dolar AS untuk keperluan militer. Sementara itu, Palantir—perusahaan teknologi militer yang bergerak di bidang intelijen dan pengawasan mendapatkan kontrak 7,95 juta dolar dari Departemen Pertahanan AS (The Guardian, 2025). Meskipun kapitalis teknologi tidak tampil sebagai pemenang utama dalam OBBBA, beberapa di antaranya tetap memperoleh keuntungan melalui proyek-proyek strategis negara, terutama yang bersinggungan dengan sektor keamanan nasional.

Dominasi kapitalis finansial di AS menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terpilihnya Donald J. Trump sebagai presiden. Namun, kekuasaan Trump tetap bergantung pada sejauh mana kepentingan fraksi-fraksi kapitalis lainnya terakomodasi. Trump tidak hanya bertindak sebagai presiden, tetapi juga sebagai perwakilan langsung dan perwujudan dari modal itu sendiri, seorang kapitalis finansial yang memimpin komite kepentingan kelas, bukan sekadar menjalankan fungsi normatif negara. Penggunaan strategi tarif untuk memperluas dominasi kapitalisme AS, khususnya kapital finansial di negara-negara lain merupakan langkah yang logis.

Tarif menjadi instrumen pemaksa kepentingan modal AS dalam tatanan global, mengamankan jalur akumulasi, dan memastikan bahwa negara-negara berkembang tetap berada dalam posisi subordinat dan rantai nilai internasional. Kebijakan tarif dan neoliberalisme domestik di era Trump, tidak seperti pada periode-periode sebelumnya, tidak ditujukan untuk memulai proyek industrialisasi. Sebaliknya, tarif digunakan sebagai alat untuk menjinakkan negara-negara eksportir dan memperkuat posisi tawar kapitalis Amerika dalam perdagangan global. Tidak ada kebijakan industrialisasi yang secara nyata menguntungkan sektor manufaktur domestik. Menurut Blecher (2018) tarif tidak memberikan manfaat berarti bagi kelas pekerja dalam hal penciptaan lapangan kerja, melainkan justru menguntungkan perusahaan.

Alih-alih membangun pekerjaan layak dan merevitalisasi industri, kebijakan Trump hanya mendorong tumbuhnya industri berskala kecil dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman, baik dari sisi lingkungan maupun kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa klaim industrialisasi hanyalah kedok bagi kebijakan yang tetap berpihak pada modal, bukan buruh. Akhirnya, fakta tersebut menggemakan apa yang telah dituliskan oleh Fitzgerald (2004) tentang perilaku kelas atas Amerika, *“Mereka adalah orang-orang yang bodo amat... Mereka menghancurkan benda dan makhluk, lalu mundur kembali ke dalam uang mereka atau apa pun yang menjaga mereka tetap bersatu, dan membiarkan orang lain membersihkan kekacauan yang telah mereka buat.”* Hal tersebut tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1: Dimensi negara di bawah pemerintahan Trump

Dimension	Possible Elements of the State and Politics under Trump
Relationship of the state to the economy	<p>Overlap of the political elite and the capitalist class in the form of a politician-turned-billionaire. There is a tendency for the blurring of the boundaries between the state and big capital.</p> <p>Economic policies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Low-tax economy with massive tax reductions for corporations and the rich • Protectionism (e.g. tariffs) and de-globalisation of the US economy. • State intervention in favour of big capital (oil/gas/coal industry, health care and pharmaceutical industry, private education, construction, etc.) • Private-public partnerships in infrastructure projects featuring socialised financial risk and private ownership. • Logic of privatisation and for-profit in health care and education

State institutions and the relationship of the state to citizens to the state	<ul style="list-style-type: none"> • Law and order politics • Close political ties to far-right figures, friend/enemy-logic, revanchism (“screw them back in spades”), and insults of opponents have raised fears of authoritarian statism. • The scapegoating of immigrants and Muslims has raised fears of authoritarian statism.
Inter-state relations	<p>Foreign trade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scepticism of international free trade agreements. • Scapegoating of other nations for socio-economic problems in the USA. Foreign policy: • Plan to build a wall between the Mexican and the US border. • Political distance and hostility towards certain countries such as China, Mexico, Iran, and Cuba. • Unilateralism • Politics of armament • Friend/enemy-scheme
Ideology	<p>Trumpology:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possessive individualism • Ideology of hard labour and performance measurement • Hierarchic leadership • Social Darwinism, survival of the fittest, cutthroat competition <p>A key question for the future of the US state and US society is to which degree these ideological elements will be used as discourses by the state and discourses on the state that are put into political practice.</p>

Sumber: Fuchs (2017)

KESIMPULAN

Idealnya, demokrasi liberal Amerika memisahkan dengan jelas antara negara dengan pasar dan membatasi campur tangan langsung kelas pemilik modal dalam politik, namun faktanya kehadiran Trump dan para kroninya dari lingkaran kapitalis besar telah menghancurkan demokrasi Amerika secara efektif. Dalam kondisi ini, negara bukan lagi alat regulatif atau penyeimbang, melainkan menjadi instrumen langsung kepentingan pemodal. Krisis struktural dalam kapitalisme Amerika dan global telah membuka jalan bagi naiknya rezim sayap kanan yang secara terang-terangan berpihak pada dominasi kelas kapitalis. Kebijakan tarif yang dikeluarkan Presiden Trump justru mempertegas pergeseran kekuasaan dari negara demokratis ke negara oligarkis sebagai pelayan segelintir elite ekonomi.

Nasionalisme ekonomi yang diusung Trump bukan saja menarik AS dari berbagai perjanjian dagang dan menerapkan tarif proteksionis, namun juga memperkuat agenda neoliberalisasi domestik dengan mendorong deregulasi sektor swasta dan pelemahan kapasitas negara. Kapitalisme ekspansionis AS beroperasi dengan logika zero-sum, maka tarif dan kebijakan perdagangan dijadikan sebagai alat untuk menundukkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam agar tetap berada dalam orbit dominasi kapitalis AS. Faktanya terlihat dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan AS, 22 Juli 2025 bukan hanya menysar sektor barang, namun juga memperluas kontrol atas infrastruktur digital dan keuangan. Data pribadi warga Indonesia agar dapat disimpan di AS menunjukkan kepentingan kapitalis teknologi, sementara pendanaan ekspor perdagangan agrikultur dan industri Amerika mencerminkan strategi kapitalis finansial dalam menanamkan dominasi struktural.

Esensi kekuasaan dibalik kebijakan Trump menunjukkan logika bahwa kelas kapitalis dapat menciptakan krisis, mengambil keuntungan darinya, lalu menarik diri dengan tenang, sementara beban sosial dan ekonomi ditanggung dan dibebankan kepada orang lain. Hal tersebut tercermin dalam OBBA untuk mengurangi pendapatan tip, upah lembur, dan wajib

pajak senior dengan memberlakukan pemotongan pajak bisnis besar, terutama memberikan pengeluaran permanen untuk beragam bentuk investasi yang meningkatkan pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan perbatasan. Perubahan ini sebagian dibiayai oleh pemotongan insentif energi bersih dan Medicaid, Undang-Undang Perawatan Terjangkau (*Affordable Care Act*), Program Bantuan Gizi Tambahan (SNAP), dan program lain yang melayani rumah tangga berpenghasilan rendah. Sebagai perbandingan, sumber daya fiskal yang dihabiskan dalam OBBBA akan cukup untuk menyelesaikan masalah pembiayaan jangka panjang jaminan sosial.

Pemerintahan Trump memiliki kecenderungan yang mendorong otoritarianisme statis dalam kapitalisme AS, sehingga finansialisasinya memperlihatkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin melalui pendekatan ekonomi untuk damai, damai untuk ekonomi atau ekonomi untuk perang dan perang untuk ekonomi (Noorsy, 2024). Kriteria penentunya adalah apakah terjadi penurunan supremasi hukum, konsentrasi kekuasaan, pembatasan oposisi politik untuk menegakkan kebijakan yang mendukung kelas kapitalis, prinsip dan ideologi kepemimpinan, serta nasionalisme yang dikombinasikan dengan skema teman/musuh dan wacana viktimisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barrow, C. W. (1993). *Critical Theories of the State: Marxist, Neo-Marxist, Post-Marxist*. Madison: University of Winconsin Press.
- Beard, A. (2000). *The language of politics*. London Mew York: Routledge.
- Fitzgerald, F. Scott. (2004) *the Great Gasby*. New York: Scribner.
- Flowerdew, J. & Richardson, J. E. (2017). *The Routledge handbook of critical discourse studies*. Taylor & Francis.
- Ghauri, M. J., & Umber, S. (2019). *Exploring the nature of representation of Islam and Muslims in the Australian press*. SAGE Open.
- Heywood, A. (2012). *Political Ideologis an Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Noorsy, I. (2024). *Prahara Bangsa*. (editor Prasetyo). Jakarta: CV. Arti Bumi Intaran.
- Peschek, J. G. (2026). *Class, Power and the State in the Trump Era: a critical analysis*. Vol 4. Berlin Boston: De Gruyter.

Artikel dalam Jurnal/Majalah

- Baran, Paul A. and Paul M. Sweezy. (1966). *Monopoly Capital*. Monthly Review Press, New York.
- Blecher, R. A. (2018). Trump Is a Protectionist — But Who Is He Protecting? <https://jacobin.com/2018/03/donald-trump-tariffs-protectionism-trade>
- Cozzolini, A. (2018). Trumpism as nationalist neoliberalism. A critical enquiry into Donald Trump's political economy. *IdPS*, Issue 4(1): 47-73.
- Farrell, H. and Abraham L. Newman. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. *International Security* 44, no. 1 (July): 42–79.
- Fharose, A. (2025). Trump dan Pemodal: Komite Kapitalis Amerika Serikat dan Kepentingannya. *JURNO*, 22 Agustus. <https://jurno.id/trump-dan-pemodal>.
- Fleming, S. & M. McCormick. (2025). Trump soaks the rich, But only if they provide higher education services. July, 14. Financial Times
- Foster, J. F. (2025). The U.S. Ruling Class and the Trump Regime. Vol 76, No. 11 (April). <https://monthlyreview.org/article-author/john-bellamy-foster/>
- Fuchs, C. (2017). Donald Trump: A Critical Theory-Perspective on Authoritarian Capitalism. *Triple C*. 15(1): 1-72. [http://www.tri\[le-c.at](http://www.tri[le-c.at).
- Greer, Jamieson. L. (2025). 2025 *National Trade Estimate Report FOREIGN TRADE BARRIERS of the President of the United States on the Trade Agreements Program*. United States Trade Representative, March.

- Khoirunisa, A., & Indah, R. N. (2022). Argumentative statements in the 2016 presidential debates of the US: A critical discourse analysis. *Journal of English Education and Linguistics Studies*, 4(2), 155–174.
- Luce, E. (2025). Donald Trump's big, beautiful act of self-harm. *Financial Times*.
- Mogashoa, T. (2014). Understanding critical discourse analysis in qualitative research. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, 1(7), 104–113.
- Mullet, D. R. (2018). A general critical discourse analysis framework for educational research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142.
- Suppiah, P. C., Kaur, S., Arumugam, N., & Shanthi, A. (2019). News coverage of foreign sex workers in Malaysia: A critical analysis. *GEMA Online® Journal of Language Studies*, 19(1), 136–152.
- The Guardian. (2025). OpenAI wins \$200m contract with US military for 'warfighting.' June 17.
- Torino, V. (2025). Tariffs in U.S. Trade Policy: Historical Patterns, Economic Effects, and 2025 Projections. *REVIEW OF INTERNATIONAL & EUROPEAN ECONOMIC LAW*. A1.1-a1.13, June.
- Trump, D. (2025). Fact Sheet: The United States and Indonesia Reach Historic Trade Deal. July 22. <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-the-united-states-and-indonesia-reach-historic-trade-deal/>
- U.S. Department of War. (2025). Contracts for May. 21, 2025. <https://www.war.gov/>
- William, A. (2025). Indonesia agrees to drop non-tariff barriers in trade victory for Donald Trump. *Financial Times*.